**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu: mendeskripsikan gagasan yang disajikan oleh Kompas dalam pemberitaan terorisme, mengetahui mengapa pemberitaan Kompas memiliki kecenderungan untuk memberikan stigma dalam pemberitaan terorisme, mendeskripsikan jenis-jenis stigmatisasi yang dikembangkan oleh Kompas, dan mengetahui relasi antara wacana terorisme yang dikembangkan Kompas dengan wacana terorisme yang terdapat di masyarakat.

Pemberitaan Kompas tentang terorisme di Indonesia diturunkan dalam beberapa gagasan yang menjadi tema utama pemberitaan. Tema-tema pemberitaan tersebut adalah: keterkaitan antara terorisme dengan pemilu dan agama, kedudukan terorisme sebagai musuh bersama, keterlibatan pihak asing, penanganan yang tepat, dan dampak yang ditumbulkan dari aksi teror. Tema-tema pemberitaan tersebut dimanifestikan dalam berita yang diturunkan Kompas dalam bentuk berita utama (*headline news*), berita sekilas, *feature,* hasil jajak pendapat, foto, berita daerah dan tajuk rencana.

Dalam proses pemberitaan tentang terorisme Kompas melakukan stigmatisasi dalam tiga varian stigma. Bentuk pertama stigma yang dberikan adalah *Abominations of the body* (ketimpangan fisik) yang muncul dalam stigmatisasi kelompok tertentu dengan tanda-tanda fisik yang melekat. Penyebutan ciri-ciri fisik tertentu dari pelaku teroryangmenjadikan identitas tersebut melekat pada suatu kelompok dan akhirnya diterima sebagai ciri-ciri khas dari para pelaku teror. Sosok yang memelihara jenggot, berpakaian muslim, perempuan bercadar, dan celana di atas mata kaki menjadi contoh bagaimana ciri-ciri fisik dilekatkan pada pelaku teror. Nama dari para pelaku teror dikaitkan dengan ciri fisik yang melekat tersebut, seperti penyebutan Ahmad Jenggot.

Bentuk kedua adalah *Blemishes of individual character* yang muncul dalam penyebutan perilaku yang dianggap menyimpang dari para pelaku teror. Sebagai contoh penyebutan tokoh masyarakat, panutan agama, dan orang baik yang kemudian diikuti dengan pernyataan yang menunjukkan mereka sebagai pelaku teror. Jenis ketiga adalah *Tribal stigmas* yangdiberikan terhadap daerah Jawa Tengah yang diposisikan sebagai sarang teroris, dan memposisikan keluarga para teroris sebagai bagian dari aksi teror. Jenis tribal stigma merupakan varian yang paling banyak muncul dalam pemberitaan Kompas tentang terorisme.

Wacana yang dikembangkan Kompas tentang terorisme, ciri-ciri pelaku, dan gambaran tentang keluarga pelaku teror tidak hanya dipandang sebagai refleksi dari fakta semata tetapi bagian dari upaya representasi realitas yang ada. Media merupakan arena untuk menghadirkan kembali berbagai kenyataan sosial melalui bangunan berita yang diterbitkan. Pada saat melakukan representasi tersebut media juga tidak mampu menjalankannya secara otonom melainkan sangat tergantung pada kepentingan ekonomi, politik, sosial dan campur tangan pemilik media. Pemilihan nara sumber, pemilihan fakta dan cara fakta dimanifestasikan dalam teks menunjukkan bagaimana kerangka kerja media tidak lepas dari kepentingan yang melingkupinya.

Pengutipan sumber resmi dari kepolisian, pemerintah maupun dari tokoh-tokoh yang dianggap kredibel tidak hanya bagian dari menghadirkan fakta secara utuh tetapi juga menunjukkan bagaimana mekanisme penanaman ideologi dominan berjalan. Kelompok yang disebut teroris, kaitan terorisme dengan agama tertentu, ciri-ciri pelaku teror dan keterlibatan pihak asing dalam rangkaian aksi di Indonesia tidak serta merta hadir begitu saja melainkan melalui proses penanaman ideologi di dalamnya. Analisis wacana tidak berpretensi untuk memberikan penilaian normatif melainkan mengungkap bagaimana mekanisme kerja media yang muncul dalam manifestasi teks kaitanya dengan kognisi sosial dan konteks sosial.

Relasi wacana yang dikembangkan media dan wacana yang berada di masyarakat menunjukkan bagaimana kerja media tidak lepas dari konteks sosial dimana media tersebut berada. Teks sebagai manifestasi dari kerja media tidak lepas dari konteks yang melingkupi. Sebagai sebuah institusi sosial maka kekuatan media mendefinisikan realitas menjadi ajang pertarungan beragam konteks yang bertemu dengan kognisi sosial awak media. Ketika kognisi sosial dan konteks sosial bertemu pada titik persamaan maka wacana yang dihasilkan dalam pemberitaan media menunjukkan bagaimana representasi yang dilakukan media berjalan seiring dengan konteks berita tersebut muncul. Di sisi lain ketika teks yang dihasilkan tidak mencerminkan kesamaan pandangan antara kognisi sosial dan konteks sosial maka dua kemungkinan yang bisa terjadi adalah: *pertama,* distorsi fakta dan penulisan fakta yang dilakukan jurnalis, *kedua* terdapat perbedaan pandangan antara jurnalis dan masyarakat dalam mendefinisikan suatu realitas.

1. **Implikasi**
2. **Implikasi Akademis**

Stigmatisasi pemberitaan terorisme di Kompas berjalan dalam kerangka rutinitas kerja media yang terstruktur. Hasil analisa terhadap teks, kognisi sosial dan konteks sosial menunjukkan ketidaksatuan antara ketiga unsur tersebut. Ketidaksatuan antara kognisi sosial dengan manifestasi teks menunjukkan adanya distorsi dalam proses produksi berita. Mekanisme kerja redaksi yang bersifat rutin mengakibatkan proses diskusi terhadap tema-tema pemberitaan tidak berjalan sehingga kepekaan dalam menilai implikasi pemberitaan kurang mendapat perhatian. Kognisi wartawan dan redaktur yang membuat berita secara sadar menyatakan pentingnya verifikasi data dan membangun pemberitaan yang tidak mengarah pada proses stigmatisasi (bersifat netral). Pada praktiknya manifestasi teks yang dihasilkan media justru penuh dengan upaya stigmatisasi. Proses stigmatisasi berjalan dalam kerangka kesadaran kerja dari para jurnalis yang menganggap bahwa standar pemenuhan aspek faktual, *fairness*, dan *balance* menjadi acuan kerja profesionalitas media.

Gans dan Gitlin mengkategorikan beberapa perspektif teoritis yang digunakan untuk melihat isi media. Pertama adalah isi media merefleksikan realitas tanpa distorsi atau hanya ada sedikit distorsi dari realitas. Kedua isi media dipengaruhi oleh sosialisasi dan sikap dari pekerja media. Ketiga, isi media dipengaruhi rutinitas kerjanya, keempat isi dipengaruhi kekuatan institusi lain di luar media, dan kelima isi media dipengaruhi oleh posisi ideologi dan mempertahankan *status quo*[[1]](#footnote-2)*.*

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penjelasan pada aspek pengaruh individu pekerja media dan rutinitas kerja organisasi dalam melahirkan stigmatisasi. Sisi individu jurnalis meyakini bahwa stigmatisasi tidak boleh dilakukan oleh media sehingga campur tangan ideologi dan kepentingan lainnya harus dihindarkan. Upaya untuk memenuhi standar nilai berita yang dijadikan acuan kerja jurnalis yang kemudian mengarahkannya untuk melakukan liputan dengan detail dan memilih isu yang mampu menarik sisi ketertarikan audiens. Hasil ini memberikan penjelasan bahwa aspek rutinitas kerja media dimana redaksi memberikan penugasan untuk melakukan liputan dan penulisan berita yang memenuhi kaidah nilai berita telah mendorong individu wartawan bekerja dengan standar tersebut.

Di sisi lain materi fakta yang ditulis oleh jurnalis menjadi bahan berita yang diputuskan dalam rapat redaksi. Distorsi antara kesadaran tentang pentingnya berita yang netral dan manifestasi teks yang sarat stigmatisasi merupakan penjelasan bagaimana mekanisme kerja media yang bersifat rutin dalam jangka waktu yang panjang mengikis kepekaan dan kesadaran tersebut sehingga berita yang dihasilkan lebih diarahkan untuk memenuhi kaidah nilai berita dan kurang mempertimbangkan implikasi pemberitaan.

Kondisi tersebut apakah bisa dimaknai sebagai sebuah pilihan ideologis dari seorang jurnalis atau justru ideologi individu lebur dalam kerangka kerja media yang telah melembaga. Gagasan ideologi dalam penjelasan Karl Marx yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan secara khusus sehingga orang menganggapnya sesuatu tersebut sah mengindikasikan kuatnya basis ekonomi dalam mempengaruhi supersturktur. Meski demikian hasil penelitian tidak menunjukkan adanya tekanan ekonomi politik pada individu jurnalis ketika menulis berita. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa lemahnya mekanisme diskusi dalam pembahasan isu-isu yang sensitif dan berpotensi konflik dalam internal media memberikan kontribusi bagi lahirnya stigmatisasi.

Pengutipan sumber resmi dari kepolisian untuk setiap peliputan terorisme tidak serta merta dimaknai semata sebagai upaya untuk menyalurkan gagasan ideologi dominan atau ideologi negara dalam memandang kasus terorisme. Penulis melihat kondisi tersebut sebagai ketidakmampuan dari jurnalis untuk menggali informasi lebih jauh dalam pembahasan kasus terorisme. Tuntutan untuk menghasilkan berita dalam waktu yang cepat guna memenuhi unsur kecepatan dengan sendirinya mereduksi kemampuan dan kesempatan menggali informasi lebih dalam. Artinya mekanisme tuntutan kinerja yang dibebankan redaksi memberi kontribusi pada kondisi tersebut. Alasan kedua yang mungkin diajukan adalah kemalasan atau ketidakmampuan dari jurnalis untuk mengakses nara sumber yang berbeda sehingga mereka terjebak pragmatisme.

Gagasan ini tentu tidak serta merta mengabaikan gagasan Gramsci dan Althusser ketika melihat media massa serta kalangan jurnalis yang bekerja di dalamnya termasuk dalam lingkup masyarakat sipil dan “*ideological state apparatus* (ISA). Marxis Althusserian memandang praktek ideologi dalam media massa relatif otonom dari determinasi ekonomi. Dalam kaitan temuan peneliti pandangan tersebut bisa diterima mengingat hasil wawancara yang dilakukan dengan jurnalis media tidak menemukan jawaban tersebut. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan konseptual ekonomi politik media sehingga tidak memberikan kontribusi konseptual dalam ranah pembahasan teori tersebut.

1. **Implikasi Praktis**

Dalam pemberitaan Kompas tentang terorisme, stigmatisasi yang dilakukan membawa konsekuensi bagi mereka yang terstigma dari berita tersebut. Penyebutan nama daerah tertentu sebagai basis teroris berpotensi untuk menggali konflik dan memperkuat stigmatisasi. Individu yang berasal dari daerah tersebut menanggung beban stigmatisasi yang sama dengan para pelaku teror. Bagi individu yang memiliki ciri-ciri sama dengan para teroris yang disebutkan media akan menerima dampak yang sama dalam bentuk diskriminasi dan hukuman sosial di masyarakat. Bagi keluarga teroris maka beban sebagai orang tua teroris, anak teroris, istri teroris dan bagian keluarga lainnya dikaitkan dengan penyebutan sebagai bagian dari teroris.

1. **Implikasi Sosial**

Terorisme memiliki sejarah panjang di berbagai belahan dunia. Relasi antara media dan terorisme menarik beragam penelitian untuk melihat bagaimana struktur wacana yang dikembangkan media meresap dalam struktur kognitif audiens. Struktur kognitif dalam benak audiens akan menuntunnya bersikap dan berperilaku dalam menghadapi isu terorisme. Dalam struktur kognitif masyarakat, wacana yang diberitakan media menggiring cara mereka berfikir dan bersikap dalam menghadapi para pelaku teror, keluarga teroris, dan menggiring tindakan nyata di lingkungan sekitarnya.

Diskriminasi dalam bentuk tindakan dan pengucilan yang dilakukan terhadap keluarga pelaku teror merupakan contoh nyata bagaimana struktur kognitif yang ada dalam benak audiens menuntun sikap dan tindakan mereka. Struktur kognitif yang melekat dalam benak masyarakat tersebut berimplikasi pada beragam tindakan sosial yang diberikan terhadap mereka yang menanggung stigma. Sebagai contoh pengaitan Pondok Ngruki sebagai asal dari para pelaku teror akan membekas dalam benak masyarakat untuk selalu mengaitkan nama tersebut dengan tindakan teroris. Ada hukuman sosial yang diberikan baik dalam bentuk penyebutan, diskrimasi maupun pengucilan bagi mereka yang terkait dengan nama tersebut.

Benih-benih kecurigaan yang muncul terhadap individu dan kelompok tertentu yang dikaitkan dengan tindakan terorisme berpotensi untuk memicu konflik dan mengelompokkan masyarakat dalam jarak sosial. Sebagai contoh masyarakat di daerah tertentu menolak pemakaman jenazah pelaku teror di daerahnya karena takut daerah mereka disebut sebagai kota teroris. Di sisi lain keluarga menghendaki jenazah tersebut dimakamkan di daerahnya. Benturan kepentingan ini membuat jarak sosial antara masyarakat dengan keluarga pelaku teror.

Struktur kognitif yang membekas dalam benak masyarakat bersifat laten dan sewaktu-waktu akan menguat kembali ketika dipicu oleh pemberitaan media. Berita media mengingatkan kembali tentang definisi terorisme, pelaku, keluarga dan bagaimana terorisme seharusnya disikapi. Media melalui pemberitaanny melakukan amplifikasi dari memori laten yang telah terstruktur di benak masyarakat.

1. **Rekomendasi**
2. **Akademis**

Suatu penelitian tentu tidak akan pernah terlepas dari keterbatasan, demikian halnya dengan penelitian ini yang memanfaatkan data sekunder untuk melakukan analisis konteks sosial. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dengan memanfaatkan *media reviews*, literatur, dan informasi dari pihak lain tentu memiliki bias dan keterbatasan cakupan. Terdapat kesempatan ruang dan waktu yang bisa dimanfaatkan dalam penelitian lain untuk menyempurnakan penelitian ini dengan memanfaatkan kerangka berpikir atau perspektif yang berbeda. Sebagai contoh dengan memanfaatkan *genre* interpretif yang menggunakan sudut panjang subjek penelitian maka kemungkinan untuk mengungkap pengalaman individu terkait dengan fenomena stigmatisai terorisme akan bisa digali lebih dalam.

Pengalaman individu dari para korban stigmatisasi pemberitaan terorisme tidak hanya menjadi data primer yang tidak mengalami distorsi tetapi juga memberikan gambaraan nyata dari efek pemberitaan. Peneliti merekomendasikan kepada pihak lain yang tertarik untuk meneliti pemberitaan terorisme dengan menggunakan analisa teks supaya menggabungkan dengan alat analisa lainnya. Upaya untuk memperluas cakupan penelitian dengan memperdalam analisa akan memberikan gambaran lebih detail bagi analisa penelitian.

1. **Praktis**

Pemberitaan kasus yang menyangkut kepentingan nasional tidak hanya berkaitan dengan kepentingan nilai berita dan landasan hak untuk memperolah informasi (right to inform) yang dimiliki oleh audiens. Dalam pemberitaan kasus yang berpotensi untuk terjadinya stigmatisasi seperti terorisme, agama, kesukuan, dan ras, maka pertimbangan nilai berita harus dikaitkan dengan efek negatif yang ditimbulkan. Dalam memberitakan kasus seperti terorisme maka kejujuran adalah mekanisme yag lebih tepat disamping keseimbangan pemberitaan. Pengumpulan fakta dari kedua belah pihak tidak menafikan dari adanya distorsi. Artinya untuk memenuhi kaidah obyektifitas media akan berusaha untuk menggali informasi dari sisi namun tidak berarti bahwa kondisi tersebut selalu ideal dalam pemberitaan. Kejujuran dalam menghadirkan fakta pada satu sisi mengurangi sentimen personal, organisasi atau dominasi ideologi meskipun terkadang tidak memenuhi aspek nilai berita.

Dalam pemberitaan kasus terorisme peneliti merekomendasikan kepada media untuk mendorong terjadinya diskusi sehat dan berimbang bagi penyelesaian kasus tersebut dan menghindari stigmatisasi. Diskusi yang sehat dan beradab akan lebih bermanfaat bagi penyelesaian kasus tersebut daripada mengejar nilai berita yang mengedepankan kepentingan ekonomi media. Dalam diskusi dan pemberitaan yang mengarah pada mekanisme penyelesaian masalah tidak hanya bermanfaat bagi individu yang terkait langsung melainkan juga bermanfaat dalam konteks kepentingan negara yang lebih besar.

Dalam konteks kebijakan media maka dinamika kerja dan struktur kerja dari jurnalis perlu mendapatkan perhatian lebih serius agar kerja jurnalis tidak hanya benar dari sisi kaidah nilai berita. Kemampuan kinerja jurnalis untuk menghasilkan produk berita yang memenuhi standar nilai berita tertentu menunjukkan professionalitas kerjanya. Di sisi lain produk berita tersebut tidak akan memberi manfaat dan justru menimbulkan kerugian bagi pihak lain jika tidak memperhatikan konteks sosial di sekitarnya. Berita tentang terorisme dianggap memenuhi nilai berita jika mampu menghadirkan fakta komprehensif dari berbagai sisi. Meski demikian fakta yang disajikan dengan kaidah penulisan jurnalistik yang tidak peka konteks sosial justru menggiring pada upaya stigmatisasi yang merugikan sebagian pihak.

Dalam temuan peneliti nampak bahwa kognisi jurnalis dalam membuat berita terorisme bersandar pada kaidah normatif menghasilkan berita yang memenuhi standar nilai tertentu. Artinya kaidah untuk mendasarkan berita pada fakta yang komprehensif menjadi tujuan utama dari kerja jurnalis. Upaya untuk memenuhi standar tersebut menjadi tuntutan yang diberikan institusi tempatnya bekerja dan menjadi garis kebijakan media dalam peliputan berita. Kaidah ini memberikan standar kerja bagi seorang jurnalis untuk menghasilkan berita sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan.

Tahapan kedua adalah bagaimana fakta ditulis dan di produksi menjadi teks. Mekanisme kerja Kompas yang mensyaratkan proses pengeditandalam beberapa tingkatan menjadi upaya untuk melakukan kontrol kerja jurnalis agar memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan. Garis kerja mekanisme kontrol tersebut memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan dari fakta yang telah ditulis oleh jurnalis di lapangan. Proses stigmatisasi pemberitaan lahir dari serangkaian mekanisme tersebut dimulai dari bagaimana fakta di lapangan dipilih dan dikumpulkan oleh seorang jurnalis.

Setelah inti berita diberikan kepada redaksi maka jurnalis berada pada posisi pasif dalam ranah diskusi materi pemberitaan. Jurnalis menyelesaikan penulisan berita dan menunggu koreksi apa yang akan diberikan oleh redaksi. Keputusan di posisi apa berita akan ditempatkan dan bagaimana berita akan ditonjolkan menjadi wilayah yang sepenuhnya dikuasai redaksi. Pada titik ini nampak bagaimana terputusnya jalinan diskusi dan pembahasan materi pemberitaan yang memungkinkan distorsi berita semakin besar. Pada posisi penyelia bahasa, bias tersebut bisa semakin besar mengingat mereka yang berada pada posisi ini bisa jadi tidak memperhatikan makna dan implikasi diksi yang digunakan. Focus perhatian pada kaidah penggunaan bahasa yang benar secara ejaan resmi bisa mengabaikan unsur makna yang dihasilkan dalam pemberitaan. Oleh karena itu perlu bangunan komunikasi yang bisa mengakomodasi kondisi tersebut sehingga proses stigmatisasi bisa dikurangi.

Berikut visualisasi konsep bangunan komunikasi yang penulis rekomendasikan berdasar temuan penelitian ini.

Berita

Editor

(validasi, editing)

Rapat redaksi

Penyelaras bahasa

Penata letak/lay out

Percetakan

* Jurnalis
* Redaktur
* Tokoh masyarakat
* Tokoh agama
* Pemerintah
* LSM
* Akademisi

Bagan.5.1 Visualisasi Bangunan Komunikasi

Keterangan Bagan: .

* Panah hitam tanpa putus menunjukkan alur produksi berita yang terjadi di media
* Panah hitam putus-putus menunjukkan mekanisme pengecekan data/fakta yang dilakukan redaktur
* Panah biru putus-putus merupakan tawaran dari peneliti untuk membahas materi-materi berita yang berpotensi konflik dan menimbulkan stigmatisasi dengan melibatkan beragam *stakeholders*

Materi liputan (penugasan, dan inisiatif wartawan

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka rekomendasi bangunan komunikasi yang perlu dikembangkan dalam mekanisme kerja jurnalis adalah sebagai berikut:

* Pertama, pentingnya validasi dan diskusi kebenaran fakta dengan jurnalis yang melakukan liputan langsung sehingga kebenaran fakta dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme diskusi tersebut terputus terutama bagi jurnalis atau kontributor yang berada jauh dengan kantor redaksi. Kurangnya diskusi antara redaktur dan jurnalis membuat bias penulisan fakta semakin besar terjadi. Ketidaksatuan antara kognisi wartawan di lapangan dan staf redaktur yang mengedit berita membuat jarak antara representasi yang ditulis wartawan dan redaktur semakin terdistorsi.
* Pemberitaan yang menyangkut kasus tertentu dan berpotensi untuk terjadinya stigmatisasi yang merugikan pihak lain maka implikasi sosial menjadi pertimbangan utama daripada sekedar kepentingan memenuhi standar nilai berita. Dalam contoh kasus terorisme maka kebijakan media media tidak hanya berpijak pada standar nilai berita tetapi mengedepankan diskusi tentang implikasi yang ditimbulkan. Dalam rutinitas rapat redaksi untuk menentukan berita yang dikeluarkan, mekanisme diskusi tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Rapat redaksi seringkali hanya menjadi proses pemilihan dan pengesahan berita yang akan diturunkan dan tidak menjadi arena diskusi dalam membahas isu-isu sensitif dalam pemberitaan.
* Dalam rutinitas kerja media yang berjalan setiap hari terdapat relasi komunikasi yang terputus antara redaksi dan jurnalis di lapangan. Pola komunikasi searah nampak ketika berita diberikan kepada editor sampai dengan penyelaras bahasa dimana jurnalis tidak terlibat lagi secara langsung dalam penulisan berita. Ada semacam kerja yang terpisah secara kognisi dalam kerangka kebijakan media yang mensyaratkan mekanisme kerja berjenjang[[2]](#footnote-3).
* Upaya untuk menghubungkan antara kognisi wartawan, redaktur dan kepentingan insitusi membutuhkan forum rutin yang dijalankan secara konsekuen.

Kebijakan media dalam proses *news gathering* melibatkan rangkaian kerja yang menghubungkan kognisi wartawan, redaktur dan konteks sosial dimana berita tersebut lahir. Pada tahapan ini semestinya model penugasan terhadap wartawan di lapangan juga mempertimbangkan konteks sosial dimana fakta diliput dan tidak sekadar mempertimbangkan nilai berita semata. Tahapan *news editing* dalam rutinitas kerja media seringkali tidak melibatkan jurnalis di lapangan sebagai pembuat berita. Ada mekanisme searah dimana proses koreksi berjalan tidak melalui diskusi timbal balik. Untuk model berita yang tidak berimplikasi sosial signifikan dan mengandung isu-isu sensitif mekanisme searah tersebut bisa dijalankan karena kerja media menuntut kecepatan.

Untuk berita yang memuat isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan berimplikasi sosial besar maka aspek kecepatan dan aktualitas berita semestinya diletakkan dalam kerangka pertimbangan yang lebih rendah dari aspek implikasi sosial yang ditimbulkan. Konsekuensinya berita tersebut harus ditulis dengan mengedepankan aspek kemanfaatan dan penyelesaian masalah dengan menghindari upaya stigmatisasi. Upaya mengembangkan konsep kebijakan media tersebut tentunya membutuhkan dukungan dan kesamaan persepsi dari awak media dalam melakukan reportase dan menuliskan fakta.

1. Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese, *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media: 2nd edition* (New York: Longman, 1996).hal 6-7 [↑](#footnote-ref-2)
2. Setelah seorang jurnalis melakukan liputan dan menyerahkan hasil tulisan kepada editor/redaktur maka seolah muncul anggapan bahwa rangkaian kerjanya secara kognisi telah selesai. Muncul semacam pemikiran bahwa selanjutnya terserah redaksi mau dijadikan apa berita tersebut. Relasi komunikasi terjadi ketika redaktur meminta jurnalis untuk menambahi atau mengurangi fakta, melakukan perubahan tema dan perbaikan penulisan. Jika hal tersebut tidka terjadi maka relasi komunikasi telah terputus. Bangunan komunikasi seperti inilah yang lazimnya terjadi pada rutinitas kerja media [↑](#footnote-ref-3)